



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AFIFI LUBIS**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **483963**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.695.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 525 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 141 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 127 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA SIBOLGA , WARISAN Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
7. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
8. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA TAPANULI TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 965.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2005, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 40.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000



3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 585.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.094.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.043.263.732
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.797.763.732
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.797.763.732

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.